

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, 2008. **Audit Manajemen**. Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 172
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2000. **Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan**. Bandung : PT Remaja Rosdakary
- Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2013. **Kecamatan Ngrayun Dalam Angka**. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
- _____. 2014. **Kecamatan Ngrayun Dalam Angka**. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
- _____. 2015. **Kecamatan Ngrayun Dalam Angka**. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
- Dirjend Pajak, 2012. **Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah**. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Erly Suandy, 2005, **Hukum Pajak**, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Kartini Kartono. 2003. **Pemimpin Dan Kepemimpinan**. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kencana, Inu. 2003. **Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia**. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2009. **Perpajakan**. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit. Andi.
- Mathis, dan Jackson, 2002, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Salemba Empat
- Moleong, Lexy J. 2005. **Metologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari, 2003. **Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi**. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Poerwadarminta. 2007. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: PN Balai. Pustaka
- Robbins, Stephen P, 2003. **Perilaku Organisasi, Jilid 2**, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

- Sedarmayanti. 2007. **Manajemen SDM Cetakan 1**. PT. Refika Aditama. Bandung
- Siagian, Sondang. P.2002. **Kepemimpinan Organisasi dan Perilaku Administrasi**. Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Siti Resmi. 2003. **Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu**, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Soenarmo. 2003. **Fasilitator** .Edisi Revisi Cetakan Kedua. Yogyakarta : Andi
- Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, **Perpajakan Indonesia**, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B**. Bandung : Alfabeta
- Thoha Miftah.2010. **Kepemimpinan dan Manajemen**. Jakarta: Rajawali Pers : Hal : 132
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2003. **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Yaniar & Afandi, 2013. *The role of officers in land and building tax sector (study of district kajeksan, district Grabagan dan district Kenongo in Tulangan, Sidoarjo)*. **Jurnal. KMP. Vol. 1 No . 2013, Hal, 132.**

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang Nomo 16 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Dalam Negeri
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-40/PJ.7/1988 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 51/PJ/2015 Tentang Petunjuk Pelaporan, Monitoring, Dan Evaluasi Kinerja Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak

